

**SKRIPSI**

**TINJAUAN ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUBARAN  
ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM**



**Oleh:**

**IZUL ISLAM**

**1800024390**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**

**REVIEW OF THE LEGAL ASPECTS OF GOVERNMENT RESPONSIBILITY  
IN PROTECTING THE COMMUNITY THROUGH DISBANDMENT  
OF FRONT PEMBELA ISLAM ORGANIZATION**



**Written by:**

**IZUL ISLAM**

**1800024390**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements  
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

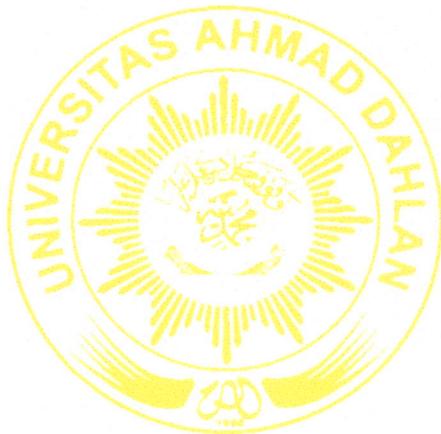
**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  
DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUBARAN  
ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Indah Nur Shanty Saleh".

**Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.  
NIPM. 19780530 201908 011 1335083**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**REVIEW OF THE LEGAL ASPECTS OF GOVERNMENT  
RESPONSIBILITY IN PROTECTING THE COMMUNITY THROUGH  
DISBANDMENT OF FRONT PEMBELA ISLAM ORGANIZATION**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Indah Nur Shanty Saleh".

**Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.  
NIPM. 19780530 201908 011 1335083**

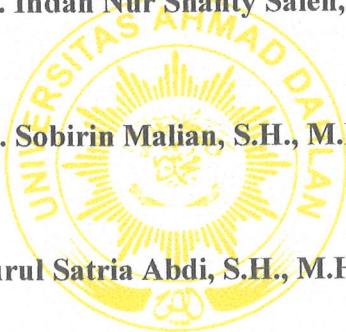
**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pada Tanggal:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.**



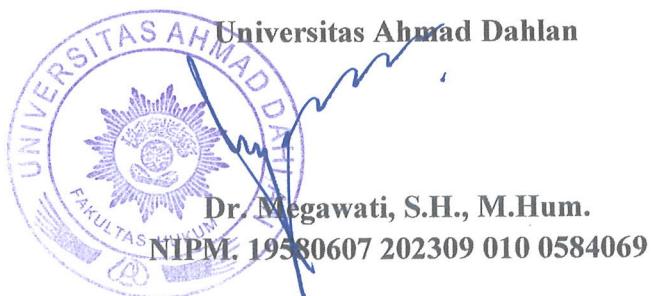
**Anggota Penguji I : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji II : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.**

Two handwritten signatures are shown above the names of the examiners. The top signature is "Shanty Saleh" and the bottom one is "Sobirin Malian". Both signatures are followed by a dotted line for a witness.

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**APPROVAL PAGE**

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

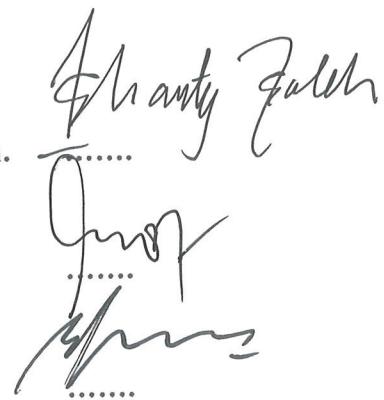
**At the Date:.....**

**THE EXAMINER BOARD**

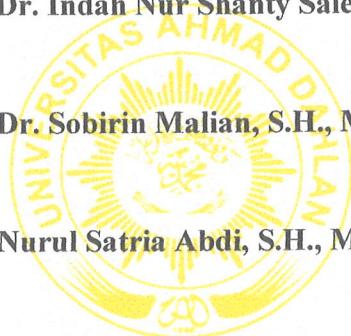
**Chairman : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.**

**Examiner I : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.**

**Examiner II : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.**



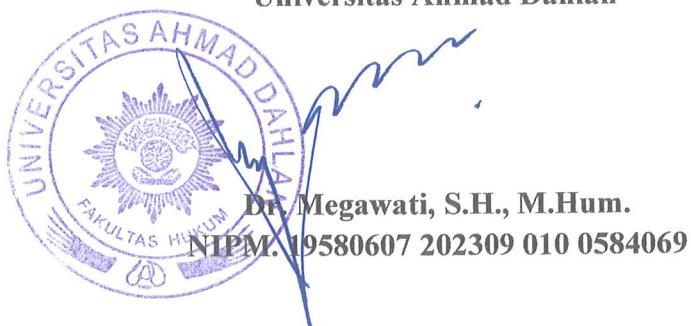
Three handwritten signatures are shown above three dotted lines, corresponding to the names of the examiners listed on the left. The signatures are written in black ink on white paper.



**Approver by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izul Islam  
NIM : 1800024390  
Email : izul1800024390@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Masyarakat melalui Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, Mei 2024

  
Izul Islam

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izul Islam

NIM : 1800024390

Email : izul1800024390@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Masyarakat melalui Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:

- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

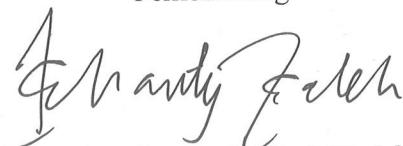
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Mei 2024



Izul Islam

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.  
NIPM. 19780530 201908 011 1335083

## HALAMAN MOTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ  
لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadikamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” (Al-Baqarah, Ayat : 216)

...

“Ali Bin Abi Thalib pernah berkata”, Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana tolong ingatkan aku bahwa cinta-Mu jauh lebih besar dari pada kekecewaanku dan rencana yang Engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik dari impianku”

...

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”  
(B.J Habibie)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan Rahmat serta Pertolongan-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sebuah karya tulis ini saya persembahkan:

1. Kepada orang tua tercinta Ayah dan Ibu karena cinta kasihnya, pengorbanan dan do'a di setiap waktunya yang mereka berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Semua guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga sampai Perguruan Tinggi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga;
3. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan semangat;
4. Almamater yang saya banggakan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Masyarakat Melalui Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, nabi pembawa rahmat bagi suluruh alam.

Seiring dengan proses penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan atas bantuannya dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.
2. Dr. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum atas bantuannya dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
3. Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., dan Wita Setyaningrum, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum atas bantuannya dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
4. Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan atas banyak bantuannya dalam penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

5. Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi.
6. Dr. Gatot Sugiarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
7. Seluruh dosen dan civitas akademika yang telah banyak memberikan pembelajaran dan membantu penulis selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang saling mensupport dalam menyelesaikan skripsi dan seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekeliruan yang tidak disadari dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak pembacanya.

Yogyakarta, Mei 2024

Izul Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	9
3. Metode Pengumpulan Data .....	10
4. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Konseptual .....	20
1. Batasan Istilah .....	20

2. Kerangka Teori.....	22
<b>BAB III TINJAUAN ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUBARAN ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM.....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Organisasi Front Pembela Islam .....	41
1. Sejarah Lahirnya Organisasi Front Pembela Islam .....	41
2. Tujuan Berdirinya Organisasi Front Pembela Islam .....	43
3. Visi dan Misi Organisasi Front Pembela Islam.....	44
4. Struktur Organisasi Front Pembela Islam .....	44
B. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Perlindungan Masyarakat Berkaitan dengan Keberadaan Organisasi Masyarakat .....	45
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	48
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.....	49
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	52
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .....	53
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan .....	55
C. Perwujudan Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Perlindungan Masyarakat melalui Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam .....	57
1. Ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Pengunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.....	57

2. Diterbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam .....	61
3. Penertiban Atribut serta Sosialisasi Pembubaran FPI .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

**TINJAUAN ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  
DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUBARAN  
ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM**

**ABSTRAK**

Pergerakan yang dilakukan Front Pembela Islam dinilai telah bertentangan dengan ideologi negara yaitu nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menimbulkan prokontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu ditetapkan SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis tanggungjawab hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat serta mengungkapkan dan menganalisis perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan hukum masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan teori dan literatur terkait pemecahan masalah yang dikaji dalam penelitian yang disebut dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban hukum pemerintah dalam perlindungan hukum masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat yaitu menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk perwujudan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Front Pembela Islam yaitu ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Maklumat Polri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, serta adanya penertiban atribut dan sosialisasi pembubaran Front Pembela Islam.

**Kata Kunci:** *Ormas; Perlindungan Hukum; SKB; Tanggung Jawab Pemerintah*

**REVIEW OF THE LEGAL ASPECTS OF GOVERNMENT  
RESPONSIBILITY IN PROTECTING SOCIETY  
THROUGH DISBANDMENT OF FRONT PEMBELA  
ISLAM ORGANIZATION ABSTRACT**

The movement carried out by Front Pembela Islam is considered to conflict with state ideology, namely the values of Pancasila and the 1945 Constitution, and it has caused pros and cons in society. Therefore, a Joint Ministerial Decree was issued regarding the Prohibition of Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Activities of Front Pembela Islam as a form of government responsibility in protecting society. This research aims to reveal and analyze the government's legal responsibility in protecting society regarding the existence of community organizations, and to reveal and analyze the realization of the government's responsibility in the legal protection of society through the disbandment of Front Pembela Islam organization.

The research method uses a normative juridical approach, namely using secondary data sources by collecting theories and literature related to solving the problems in the study, which are called primary, secondary, and tertiary legal materials.

The research results show that the government's legal responsibility in protecting community law is related to the existence of community organizations, namely establishing and enforcing laws and regulations based on Pancasila and the 1945 Constitution. The form of realization of legal protection by the government against violations committed by Front Pembela Islam community organization is the stipulation of a Joint Ministerial Decree concerning the Prohibition of Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Front Pembela Islam Activities. The Police Announcement regarding Compliance with Prohibitions on Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Front Pembela Islam Activities, as well as controlling the attributes and socializing the disbandment of Front Pembela Islam.

**Keywords:** *Community Organizations; Government Responsibility; Joint Ministerial Decree; Legal protection*

xvii	Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center  	On: <b>31/05/2022</b>
------	---	--------------------------